

**UTANG LUAR NEGERI;
PARADOKS PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA**

Oleh:

Arifin Pellu

Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah
Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya
Email: arifinpellu123@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk melihat relevansi utang luar negeri Indonesia dengan kontribusinya bagi pembangunan disertai kajian ekonomi syariah terhadap utang. Jumlah utang luar negeri Indonesia terus membengkak. Tabungan pemerintah yang diharapkan mampu mengurangi beban ULN tidak mampu mengurangi beban ULN. Malah semakin menambah beban ULN hingga menembus Rp5,410 triliun. Indonesia termasuk salah satu negara yang masih mengandalkan bantuan luar negeri untuk mendanai pembangunan, baik melalui pinjaman atau utang maupun hibah luar negeri. Pemerintah tidak memiliki komitmen yang kuat untuk melunasi utang luar negeri. Jangankan melunasi, pemerintah justru rajin menambah utang baru tanpa memperhatikan keseimbangan (balance) neraca pembayarannya. Proses pembangunan yang dilakukan adalah proses “*gali lubang tutup lubang*”. Inilah paradox utang luar negeri Indonesia.

Sementara dari sudut pandang ekonomi syariah, ULN tidak dapat dilepaskan dari bunga (riba). Riba adalah dosa besar yang wajib di jauhi oleh kaum muslimin dengan sejauh-jauhnya. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-Baqarah (2): 275, 286 dan juga Qs. An-Nisaa ayat 141, Hadits riwayat Muslim dan hadits riwayat Ibnu Majah. Dalam Islam ada bentuk-bentuk kerjasama yang diperkenankan dalam syariah, seperti Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan lain-lain, dapat dikembangkan sebagai bentuk external financing dalam anggaran negara. Bentuk-bentuk ini pada prinsipnya lebih bersifat *flow creating equity* daripada *flow creating debt*, bentuk ini dilaksanakan oleh *Islamic Development Bank* (IDB) telah banyak membiayai proyek di Negara-negara Islam dengan skema ini.

Keyword: Utang Luar Negeri, Paradox, Pembangunan

ABSTRACT

This article aims to look at the relevance of Indonesia's foreign debt with its contribution to development accompanied by a study of sharia economics on debt. The amount of Indonesia's foreign debt continues to swell. Government savings that are expected to reduce the burden of external debt cannot reduce the burden of external debt. In fact, it has even added to the burden of external debt to penetrate Rp5,410 trillion. Indonesia is one of the countries that still rely on

foreign aid to fund development, whether through loans or debt or foreign grants. The government does not have a strong commitment to pay off foreign debt. Instead of paying off, the government is diligently adding new debt without paying attention to the balance (balance) balance of payments. The development process carried out is the process of "*digging a manhole cover*". This is the paradox of Indonesia's foreign debt.

While from the perspective of Islamic economics, external debt cannot be released from interest (usury). Riba is a big sin that must be shunned by Muslims as far as possible. As Allah SWT said in QS al-Baqarah (2): 275, 286 and also Qs. An-Nisaa verse 141, Hadith narrated by Muslim and Hadith narrated by Ibn Majah. In Islam there are forms of cooperation that are permitted in sharia, such as Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, etc., can be developed as a form of external financing in the state budget. These forms are in principle more *flow creating equity* than *flow creating debt*, this form is implemented by the Islamic Development Bank has funded many projects in Islamic countries with this scheme.

Keyword: Foreign debt, paradox, development

A. Pendahuluan

Utang luar negeri merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan yang sangat signifikan bagi negara berkembang. Namun demikian hasil studi tentang dampak utang terhadap pembangunan ekonomi menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Beberapa ilmuwan memperoleh kesimpulan bahwa utang luar negeri justru telah menimbulkan perlambatan pertumbuhan ekonomi bagi negara-negara pengutang besar, sementara studi lain menyimpulkan sebaliknya-yaitu utang luar negeri menjadi salah satu faktor yang secara signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi negara-negara pengutang.¹

Banyak negara sedang berkembang (NSB) yang kini telah masuk dalam perangkap utang (*debt trap*), dan akhirnya hanyut dalam lingkaran ketergantungan utang (*debt overhang hypothesis*).² Dalam konteks argumentasi ini, patut

¹ Beberapa penelitian yang mendukung kesimpulan pertama misalnya Kenen (1990), Sachcs (1990) dan Don Busch (1998), sementara yang mendukung kesimpulan kedua antara lain Cohen (1993), Bulow dan Rogof (1990). Sementara itu Chowdurry (1997) menyimpulkan bahwa dampak ini bervariasi dari satu negara dengan negara lain. Lihat Chowdurry, Khorshed dan Amnon Levy. (1997), *Utang Eksternal dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi*, Jurnal Ekonomi Pembangunan (Yogyakarta: FE UII, Vol. 2 Nomor 2), h. 337

² Kaminsky, Graciela L dan Alfredo Preiera, *The Debt Crisis: Lessons of the 1980s for 1990s*, (Journal of Development Economics, Vol. 50, 1996), h. 221.

dipertanyakan kembali relevansi dan urgensi utang luar negeri dalam pembiayaan negara-negara berkembang.

Peranan hutang luar negeri dalam pembangunan ekonomi di Indonesia sebenarnya sudah sejak zaman penjajahan dan kemudian mencapai momentumnya pada pemerintahan orde baru sebagai salah satu pilihan politik untuk membenahi perekonomian yang kacau balau warisan orde lama. Sejarah perkembangan hutang luar negeri Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peranan World Bank sebagai lembaga donor yang memberikan pinjaman kepada Negara-negara berkembang.

Jefrey A. Winters, seorang ekonom dari Northwestern University AS mengemukakan bahwa paling tidak sepertiga dari bantuan (pinjaman) Bank Dunia untuk Indonesia bocor di birokrasi Indonesia. Dalam hasil survey *Transparency International* terhadap 52 negara, Indonesia menempati peringkat ke-7 dan di antara negara ASEAN, berada pada peringkat pertama.³

Kondisi ini semakin diperparah oleh budaya gemar berutang dan memperlmanis istilah utang luar negeri dengan bantuan luar negeri. Celaknya lagi utang luar negeri/bantuan luar negeri dari negara-negara donor, dan lembaga-lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia banyak yang dikorup oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Tingkat kebocoran ini cukup signifikan, menurut begawan ekonomi Sumitro Djojohadikusumo (alm), mencapai 30% dari total anggaran pembangunan.⁴

Sejak pemerintahan Orde Baru hingga saat ini, tingkat ketergantungan Indonesia pada utang luar negeri tidak pernah menyusut, bahkan mengalami suatu akselerasi yang pesat sejak krisis ekonomi 1997-1998, karena pada periode tersebut pemerintah Indonesia terpaksa membuat utang baru dalam jumlah yang besar dari IMF untuk membiayai pemulihan ekonomi. Pada masa normal selama pemerintahan Soeharto, utang luar negeri dibutuhkan terutama untuk membiayai

³ *Ibid.*, 74-75

⁴ Edy Suandi Hamid, *Perekonomian Indonesia Masalah dan Kebijakan Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 67.

defisit investasi dan beberapa komponen dari sisi pengeluaran pemerintah di dalam APBN.⁵

Hingga tahun 1997, pembangunan di Indonesia selalu dipuji oleh lembaga-lembaga keuangan internasional. Bahkan dalam laporan Bank Dunia pada bulan Juni 1997, Indonesia mendapat predikat keajaiban atau negara yang pertumbuhannya ajaib.⁶

Sebelumnya jatuhnya Orde Baru, Bank Dunia selalu memuji prestasi pembangunan ekonomi Indonesia. Bahkan posisi Indonesia ditempatkan sebagai salah satu negara berkembang yang sukses pembangunannya, tanpa melihat proses pembangunan itu telah merusak dan menghabiskan sumber daya alam yang ada, dan melilitkan Indonesia pada utang luar negeri yang sangat besar.⁷

Jumlah utang luar negeri Indonesia menempati peringkat ke-5 di antara negara dunia ketiga, setelah Meksiko, Brazil, India dan Argentina.⁸ Akibat krisis ekonomi yang sangat parah ini, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan *rasio stock* utang per GDP tertinggi di dunia, mengalahkan negara-negara yang selama ini terkenal sebagai pengutang terbesar, seperti Meksiko, Brazil dan Argentina.⁹

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan, nilai total utang pemerintah pusat dalam rupiah mengalami peningkatan setiap tahun. Bank Indonesia (BI) merilis data terbaru utang luar negeri Indonesia yang mencapai US\$ 360,7 miliar atau sekitar Rp 5.410 triliun (US\$ 1 = Rp 15.000). Angka ini meningkat sekitar US\$ 17,56 miliar atau Rp 263,4 triliun dibandingkan periode yang sama pada tahun 2017.¹⁰

Tabel Rincian Utang Luar Negeri Indonesia Periode Agustus 2018

No	PIHAK	US\$ MILIAR
----	-------	-------------

⁵ Tulus T.H. Tambunan, *Perekonomian Indonesia, Kajian Teoritis dan Analisis Empiris*, (cetakan kedua, Bogor : Ghalia Indonesia, 2012), h. 255.

⁶ *Ibid.* h. 180.

⁷ Edy Suandi Hamid, *op.cit.* h. 69.

⁸ Roem Topatimasang, *Hutang itu Hutang*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 8.

⁹ *Ibid.*, h. 173.

¹⁰ Detikfinance. Terbitan Rabu, 17 Oktober 2018.

1	Utang Pemerintah Pusat	178,12
2	Utang Bank Sentral	3,18
3	Utang Swasta	179,42
4	Total	360,72

Sumber : Bank Indonesia.¹¹

Selanjutnya, jika kita elaborasi negara yang menjadi kreditor terbesar, Singapura jadi juaranya dengan total mencapai US\$ 57,80 miliar. Berikut negara pemberi (kreditor) utang bagi Indonesia. Dari kreditor terbesar hingga terkecil di luar Bank Dunia.

Tabel. 5 Negara Terbesar Pemberi Utang Bagi Indonesia

No	NEGARA	US\$ MILIAR
1	Singapura	57,80
2	Jepang	28,97
3	Tiongkok	16,75
4	AS	15,48
5	Hongkong	13,66

Ket: dalam US\$ miliar. Sumber : Bank Indonesia.¹²

Data di atas memperlihatkan, kreditor terbesar Indonesia berasal dari negara-negara yang berada di kawasan Asia. Selain Singapura, ada negara-negara seperti Jepang, Tiongkok hingga Hongkong yang memberikan jumlah utang terbesar. Sementara Sementara itu, rasio utang luar negeri Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (Pertumbuhan Ekonomi) pada kuartal II-2018 turun tipis ke level 34,34% dari sebelumnya 34,39% di periode yang sama tahun sebelumnya.

Pemerintah Jokowi saat ini, menambah utang pemerintah dalam APBN 2018 hingga Rp 549,92 triliun dalam setahun. Angka ini merupakan realisasi outstanding per September 2019. Dalam realisasi APBN 2018 per September yang dipublikasikan Kementerian Keuangan, Rabu (17/10/2018) sebagaimana dirilis kantor berita CNN, bahwa total utang pemerintah pada September 2017 lalu hanya sebesar Rp 3.866,45 triliun. Realisasi per September 2018, total utang pemerintah mencapai Rp 4.416,37 triliun. Angka ini tertuang dalam APBN

¹¹ Bank Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20181016095432-17-37549/rincian-utang-luar-negeri-indonesia-yang-tembus-rp-5410-t>. Diakses pada 17 Oktober 2018.

¹² *Ibid.*,

Oktober 2018.¹³ Sementara menurut Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani yang diberitakan detikcom, total bunga utang luar negeri Indonesia tahun 2018 sebesar Rp 238,6 triliun. Yang sudah dibayarkan sebesar Rp197,8 triliun.

Terkait Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia, penulis mencoba merelevansikan dengan studi ekonomi syariah untuk lebih menelaah posisi ULN dengan sudut pandang Islam. Ekonomi Syariah menelaah lebih mendalam ada beberapa hal yang menjadikan utang Luar negeri menjadi bathil.¹⁴ Pertama utang luar negeri tidak dapat dilepaskan dari bunga (riba). Padahal Islam dengan tegas telah mengharamkan riba itu. Riba¹⁵ adalah dosa besar yang wajib di jauhi oleh kaum muslimin dengan sejauh-jauhnya. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-Baqarah (2): 275, sebagai berikut,

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا أَلَّا يَفُورُوا مِثْلَ مَا يَفُورُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) Riba tidak dapat berdiri melainkan berdinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila.¹⁶

Ada pula hadits yang melarang bunga sebagai berikut: “Jabir melaporkan bahwa Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, pemabayarnya, penulisnya, dan dua saksinya dan beliau berkata bahwa mereka itu sama (dalam dosa),” (Muslim). Abu Hurairah melaporkan, Rasulullah SAW bersabda: “Riba memiliki tujuh puluh pintu dosa. Yang paling ringan di antaranya sama dengan seorang lelaki yang menikahi ibunya sendiri,” (Ibnu Majah).

Betapa buruknya riba dan betapa besarnya dosa, cukuplah ayat suci dan hadist di atas menjawabnya. Bukan hanya pelakunya saja yang berdosa, bahkan

¹³ <https://www.cnbcindonesia.com/market/20181017105124-17-37718/fantastis-utang-pemerintah-capai-rp-4416-t-naik-rp-550-t>. Diakses pada 17 Oktober 2018.

¹⁴ Todaro, Michel P. *Economic Development, 5th Edition*, (New york, Longman Publishing, 1994),. h. 110.

¹⁵ Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhil. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhil ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

¹⁶ Lihat Q.S. al-Baqarah (2) : 275.

pembayarannya, penulisnya dan saksinya pun berdosa pula. Allah menyediakan kekekalan di dalam neraka bagi pemakannya. Nabi SAW menyebut bahwa dosa riba yang terkecil itu sama dengan dosa seorang lelaki yang berzina dengan ibu kandungnya.¹⁷

Jadi jelaslah bahwa solusi riil bagi masalah bunga ini terletak pada penegakan total pada seluruh sistem ekonomi islam. Penegakan sistem ekonomi islam secara persial atau sebagian saja tidak akan ada hasilnya. Al-Qur'an menyatakan:



Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu” ...(QS. Al-Baqarah (2):208).

Jadi masuklah kedalam islam dengan penuh dan tegakkan sistem ekonomi islam secara penuh pula. Penegakan sistem ekonomi Islam yang lengkap dan sepuh hati insyiah Allah akan mengantar ke suatu era ekonomi baru bagi umat Islam yang saat ini dalam keadaan tak berdaya dan terbelakang. Suatu tingkat kemakmuran umum akan menyebar di dalam masyarakat islam yang di dalamnya tidak akan ada orang kelaparan atau telanjang atau tak bertempat tinggal. Oleh karena itu berlakunya keadilan sosial Islam dan jaringan sistem jaminan sosial yang luas maka setiap warga Negara yang tinggal di mana pun juga dalam dunia Islam akan mendapat bagian yang memang harus didapatkannya dari kekayaan nasional.¹⁸

¹⁷ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Prenada Media Group 2012), h.52-53.

¹⁸ *Ibid.*, h. 329-330.

Berdasarkan uraian pendahuluan, menarik jika utang luar negeri Indonesia kita kaji lebih detil terkait dampaknya bagi perekonomian bangsa dan dipandang dari sudut ekonomi syariah.

B. Kajian Teori

1. Utang Luar Negeri dan Pembangunan Ekonomi

Utang luar negeri didefinisikan sebagai utang penduduk (*resident*) yang berdomisili di suatu wilayah teritori ekonomi kepada bukan penduduk (*non resident*).¹⁹ Sedangkan menurut Suparmoko Utang luar negeri adalah utang atau pinjaman yang berasal dari orang-orang atau lembaga-lembaga dari negara lain.²⁰ Todaro mengatakan bantuan luar negeri adalah seluruh pinjaman serta hibah konsensional resmi, baik dalam bentuk uang tunai maupun bentuk aktiva-aktiva lainnya, yang secara umum ditunjukkan untuk mengalihkan sejumlah sumber daya dari negara maju ke negara berkembang.²¹

Bantuan asing (luar negeri) adalah bantuan yang bersumber dari pemerintah maupun swasta. Hampir semua bantuan melalui pemerintah mempunyai syarat-syarat yang longgar (konsensional) atau lunak, yakni di berikan sebagai hibah semata-mata (*grants*) atau sebagai pinjaman dengan tingkat bunga rendah dan dengan jangka waktu pembayaran yang lebih lama dari yang ditawarkan pada pasar modal swasta internasional.²²

Pinjaman luar negeri adalah semua pinjaman yang menimbulkan kewajiban membayar kembali terhadap pihak luar negeri baik dalam valuta asing maupun dalam Rupiah.²³ Utang luar negeri merupakan bantuan luar negeri (*loan*) yang diberikan oleh pemerintah negara-negara maju atau badan-badan Internasional

¹⁹ Bank Indonesia. *Statistik Utang Luar Negeri Indonesia*. Vol. VII Mei, (Jakarta: Bank Indonesia, 2016), h. iii

²⁰ Suparmoko, *Keuangan Negara: Dalam Teori Dan Praktek*, Edisi ke-5, Cet. Ke-3 (Yogyakarta: BPFE, 2000), h. 243

²¹ Michael P. Todaro, *Ekonomi Pembangunan*, Jilid ke-2, Edisi ke-6 (Jakarta: Erlangga, 1997), h. 163

²² Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, (Jakarta: Gunadarma Press, 1993), h. 98

²³ Muhammad Iqbal Maulidi. *Pengaruh Utang Luar Negeri dan Penanaman Modal Asing terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia periode 1999-2011* (Jakarta: UIN syarif Hidayatullah, 2013), h. 20

yang khusus dibentuk untuk memberikan pinjaman semacam itu dengan kewajiban untuk membayar kembali dan membayar bunga pinjaman tersebut.²⁴

Dilain sisi, peranan hutang luar negeri dalam pembangunan dapat dijelaskan dari doktrin pembangunan yang melalui beberapa tahapan sebagaimana model pertumbuhan ekonomi linier Rostow dan model pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar. Doktrin pembangunan ekonomi Rostow menyatakan bahwa proses pembangunan ekonomi suatu Negara melalui tahapan dari perekonomian yang sederhana kemudian menjadi Negara yang maju dimulai dari tahap masyarakat tradisional, prakondisi tinggal landas, tahap tinggal landas (*take off*), masa kematangan (*maturity*) dan era konsumsi massal. Prasyarat penting untuk berjalannya proses pembangunan menuju suatu tahap pembangunan berikutnya adalah perlunya mobilisasi tabungan domestic dan luar negeri untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.²⁵

Sedangkan teori pembangunan ketergantungan (*dependency*) menjelaskan bahwa keterbelakangan Negara-negara berkembang karena adanya tekanan dan eksploitasi dari Negara-negara maju. Bantuan luar negeri/hutang luar negeri merupakan sarana bagi Negara maju untuk menguasai Negara berkembang. Kondisi ini juga dirasakan Negara Indonesia dengan jumlah hutang yang membengkak sehingga kedaulatan ekonomi menjadi kurang leluasa karena harus mengikuti agenda ekonomi yang disodorkan Negara-negara donor sebagai prasyarat untuk mendapatkan kucuran hutang luar negeri baru. Pemberian bantuan dari Negara kreditor ke Negara debitor seringkali juga bukan semata-mata alasan ekonomi tetapi karena alasan lainnya misalnya untuk menangkal masuknya ideologi politik tertentu atau untuk membangun kawasan pertahanan di suatu kawasan tertentu. Pada masa perang dingin antara blok NATO dan pakta Warsawa terjadi perang pengaruh melalui pemberian pinjaman ke Negara-negara sekutu.²⁶

²⁴ Zulkarnain djamin, *Masalah Utang Luar Negeri Bagi Negara-Negara Berkembang Dan Bagaimana Indonesia Mengatasinya*, (Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1996), h. 19

²⁵ Imamudin Yuliadi., *Analisis Hutang Luar Negeri Indonesia Pendekatan Keseimbangan Makroekonomi*. Jurnal Ekuitas. Ekuitas Vol.11 No.4 Desember 2007: h. 535–551. DOI: 10.24034/j25485024.y2007.v11.i4.2276

²⁶ *Ibid*

Ditinjau dari kajian teoritis, masalah utang luar negeri dapat diterangkan melalui pendekatan pendapatan nasional. Sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan, utang luar negeri dibutuhkan untuk menutupi 3 (tiga) defisit, yaitu kesenjangan tabungan investasi, defisit anggaran dan defisit transaksi berjalan. Menurut Tambunan, tingginya Utang Luar Negeri (ULN) di suatu negara disebabkan oleh tiga jenis defisit²⁷ :

- a. Defisit transaksi berjalan (TB) yakni ekspor (X) lebih sedikit daripada impor (M);
- b. Defisit investasi atau I-S gap, yakni dana yang dibutuhkan untuk membiayai investasi (I) di dalam negeri lebih besar daripada tabungan nasional atau domestik (S);
- c. Defisit anggaran (fiskal) atau $G - T$ (*fiscal gap*)

Dari faktor-faktor tersebut, defisit TB sering disebut di dalam literatur sebagai penyebab utama membengkaknya ULN dari banyak negara berkembang. Besarnya defisit TB melebihi surplus neraca modal (CA) (kalau saldonya memang positif) mengakibatkan defisit neraca pembayaran (BoP), yang berarti juga cadangan devisa (CD) berkurang. Apabila saldo TB setiap tahun negatif, maka CD dengan sendirinya akan habis jika tidak ada sumber-sumber lain (misalnya modal investasi dari luar negeri), seperti yang dialami oleh negara-negara paling miskin di benua Afrika. Padahal devisa sangat dibutuhkan terutama untuk membiayai impor barang-barang modal dan pembantu untuk kebutuhan kegiatan produksi di dalam negeri. Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa defisit TB yang terjadi terus menerus membuat banyak negara-negara berkembang harus bergantung pada utang luar negeri (ULN), terutama negara-negara yang kondisi ekonominya tidak mengairahkan investor-investor asing sehingga sulit bagi negara-negara tersebut untuk mensubstitusikan ULN dengan investasi, misalnya dalam bentuk penanaman modal asing (PMA).

²⁷ Tulus Tambunan, *Perdagangan Internasional dan Neraca Pembayaran : Teori dan Empiris*, (Jakarta : LP3ES, 2001), h. 249.

Ketiga defisit tersebut dapat disederhanakan di dalam sebuah model yang terdiri dari beberapa persamaan berikut²⁸ :

$$TB = (X - M) + F \dots\dots\dots (1)$$

Di mana :

TB = defisit Transaksi Berjalan

X = ekspor

M = impor

F = transfer internasional atau arus modal masuk neto.

2. Utang dalam pandangan Ekonomi Syariah

Pada dasarnya utang luar negeri itu adalah bathil. Setelah ditelaah lebih mendalam ada beberapa hal yang menjadikan utang Luar negeri menjadi bathil.²⁹

- a. Utang luar negeri tidak dapat dilepaskan dari bunga (riba). Padahal Islam dengan tegas telah mengharamkan riba itu. Riba adalah dosa besar yang wajib dijauhi oleh kaum Muslimin dengan sejauh-jauhnya.

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut:

..... اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

Artinya:

“...Dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba...” (Qs. Al-Baqarah: 275).³⁰

Masih terkait riba, selanjutnya Rasulullah SAW bersabda:

“Riba itu mempunyai 73 macam dosa. Sedangkan (dosa) yang paling ringan (dari macam-macam riba tersebut) adalah seperti seseorang yang menikahi (menzinai) ibu kandungnya sendiri...” (HR.Ibnu Majah dan al-Hakim, dari Ibnu Mas'ud).

- b. Terdapat unsur riba qard, Syukri Iska mengatakan bahwa riba dalam utang piutang adalah riba qardh.³¹ Riba qard yang dimaksud yaitu

²⁸ *Ibid.*, h. 251

²⁹ Bathil sama dengan “Setiap perbuatan yang dilarang oleh syariah, yang bernilai buruk itu masuk dalam kategori batil”.

³⁰ Lihat Qs. Al-Baqarah Ayat: 275.

adanya pinjam-meminjam uang dari seseorang kepada seseorang dengan syarat ada kelebihan atau keuntungan yang harus diberikan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman riba semacam ini dilarang di dalam Islam berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al Khudri sebagai berikut:

وال تبيعوا الدرهم بالدرهمين فإنني أخاف عليكم الرماء أي الربا

Artinya:

“Janganlah kamu menjual satu dirham dengan dua dirham, sesungguhnya aku menghawatirkan kamu berbuat riba”.

- c. Utang luar negeri menjadi sarana timbulnya berbagai kemudharatan.³² Seperti terus berlangsungnya kemiskinan, bertambahnya harga-harga kebutuhan pokok dan BBM, dan sebagainya.
- d. Bantuan luar negeri telah membuat negara-negara kapitalis mendominasi, mengeksploitasi, dan menguasai kaum Muslimin. Ini haram dan tidak boleh terjadi. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Qs. An-Nisaa ayat 141 sebagai berikut:

....وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا....

Artinya: “dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman”.³³

Secara umum terdapat dua pandangan tentang utang luar negeri sebagai alternatif menutup defisit anggaran negara. *Pandangan pertama* menganggap bahwa external financing merupakan hal yang diperbolehkan dalam Islam, meskipun bentuk dan mekanismenya memerlukan modifikasi. *Pandangan kedua* menganggap bahwa negara Islam tidak selayaknya mencari utang luar negeri sebagai penutup saving gap-nya.³⁴ Pandangan pertama ini pada dasarnya membolehkan adanya *budgeted deficit* yang ditutup dengan *external financing*, sepanjang bentuk dan mekanismenya disesuaikan dengan Syariah. Pandangan

³¹ Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Ekonomi*, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), h. 230

³² Kemudharatan = Keburukan

³³ Lihat Qs. An-Nisaa Ayat 141

³⁴ Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1992), h. 237-238

tersebut dilatar belakangi oleh konsep dan fakta historis bahwa kerjasama dengan pihak lain dalam suatu usaha diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Bentuk-bentuk kerjasama yang diperkenankan dalam Syariah, seperti Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan lain-lain, dapat dikembangkan sebagai bentuk external financing dalam anggaran negara. Bentuk-bentuk ini pada prinsipnya lebih bersifat *flow creating equity* daripada *flow creating debt*, dimana mulai banyak diimplementasikan oleh lembaga-lembaga keuangan Internasional. *Islamic Development Bank* (IDB) telah banyak membiayai proyek di Negara-negara Islam dengan skema ini.

Dibandingkan dengan utang, penyertaan modal dipandang lebih konstruktif, proporsional dan fair dalam pembiayaan, karena terdapat pembagian perolehan dan resiko (*loss-profit sharing*). Pandangan kedua, melarang Negara Islam untuk menutup *budgeted deficit* dengan utang luar negeri. Pandangan ini sebenarnya lebih dikarenakan pertimbangan faktual dan preventif, dimana keterlibatan Negara-negara Islam dalam utang luar negeri pasti akan berinteraksi dengan sistem bunga. Dalam perspektif Islam, bunga (apapun motifnya-produksi-konsumsi, berapapun besar-tinggi atau berlipat-lipat atau rendah) dipandang sebagai riba, dan karenanya dilarang oleh Agama dengan tegas.³⁵

Pada akhirnya, hal ini akan menjerumuskan dalam berbagai bentuk transaksi riba yang dilarang oleh Agama. Dengan demikian, maka sebaiknya negara Islam tidak memiliki utang luar negeri. Dalam fakta, bunga utang luar negeri juga telah menjadi beban yang berat bagi Negara-negara debitur. Sejarah perekonomian masa Rasulullah SAW menunjukkan bahwa defisit anggaran hanya pernah terjadi pada saat penaklukan Makkah (Fathu al-Makkah), tetapi segera dilunasi pada periode perang Hunain. Kebanyakan anggaran negara waktu itu seimbang atau surplus, sebagaimana kemudian diikuti oleh khulafaurrasyidin pada masa berikutnya. Pertimbangan utama keseimbangan anggaran saat itu adalah prinsip kesederhanaan dan kemampuan sebagaimana dalam ajaran Islam. Prinsip yang telah digariskan Al-Qur'an adalah tidak membebani kepada manusia kecuali

³⁵ A. Azhar Basyir, *Riba Utang Piutang dan Gadai*, (Yogyakarta: PT Al-Ma'arif, 1983), h. 12.

sebatas kemampuannya. Allah berfirman dalam surat Al baqarah ayat 286 sebagai berikut:

.... اِذْ يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا وُسْعَهَا ۗ

Artinya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.³⁶

Islam sebagai Agama pembawa rahmat, ketentuan hukumnya pasti adil dan menuju kedamaian hubungan antar manusia. Islam tidak memandang realitas kehidupan dengan sebelah mata, melainkan menilainya dari berbagai dimensi sudut pandang. Dalam persoalan utang piutang Islam tidak hanya mengatur dan menilai kondisi debitur saja, tetapi juga sekaligus kreditur, sehingga terbangun cara pandang yangimbang dan adil terhadap kedua belah pihak. Dalam kondisi normal, utang pasti harus dibayar. Namun dalam kondisi kesulitan, pailit dan krisis yang diderita oleh debitur, Al-Qur'an secara bijak menawarkan solusi yang realistis dan manusiawi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menjadi tampak jelas bahwa solusi yang ditawarkan Islam untuk memecahkan masalah krisis utang adalah sangat realistis, adil dan manusiawi, serta dapat diterapkan secara universal, baik antar pribadi, antar bangsa dan antar negara.³⁷

C. Utang Luar Negeri; Paradox Pembangunan Ekonomi Indonesia

Menurut Bank Indonesia, Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia adalah utang penduduk Indonesia kepada bukan penduduk baik dalam valuta asing dan/ atau rupiah, termasuk di dalamnya pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. ULN Indonesia mencakup ULN sektor publik (pemerintah dan bank sentral) dan sektor swasta dalam bentuk antara lain pinjaman (*loan agreement*), utang dagang (*trade credit*), surat utang (*debt securities*), kas dan simpanan (*currency and deposits*), dan kewajiban lainnya. Manfaat Utang Luar Negeri (ULN) sangat bermanfaat sebagai salah satu sumber pelengkap pembiayaan pembangunan di berbagai bidang seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Selain itu, utang

³⁶ Lihat, Al baqarah ayat 286.

³⁷ Abd Majid As, "Utang Luar Negeri Dalam Perspektif Al-Qur'an", (Jurnal Asy-Syir'ah No. 7 Th. 2000), h. 23-26

luar negeri juga bermanfaat sebagai sumber pembiayaan proyek strategis di dalam negeri, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kapasitas dan pertumbuhan ekonomi.³⁸

Indonesia sebagai negara berkembang dihadapkan dengan kondisi perekonomian yang belum stabil. Peran pemerintah dalam menstabilkan perekonomian berupa kebijakan ULN secara tidak langsung memberikan indikasi bahwa Indonesia belum mandiri. Oleh karena itu dibutuhkan peningkatan faktor-faktor produksi dalam negeri untuk mengimbangi ULN yang dilakukan pemerintah. Melalui peningkatan kegiatan ekspor diharapkan Indonesia secara perlahan dapat mengurangi ketergantungan terhadap ULN dan mampu melakukan pembangunan dengan sumber modal dari dalam negeri. Berkurangnya permintaan ULN pemerintah dan meningkatnya ekspor dapat memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang mandiri.

Persoalan ULN Indonesia terus menjadi bahasan pemerintah, politisi dan pengamat ekonom. Bukan karena persoalan politik saat ini, tapi juga persoalan-persoalan lain yang dihadapi bangsa. Misalnya, menambah beban ULN Indonesia saat ini. Tabungan pemerintah yang diharapkan mampu mengurangi beban ULN tidak mampu mengurangi beban ULN. Malah semakin menambah beban ULN. Sebagaimana penulis sampaikan pada pendahuluan bahwa beban ULN Indonesia, sebagaimana disampaikan Bank Indonesia sudah menembus Rp5,410 triliun.

Sebagai negara berkembang, Indonesia termasuk salah satu negara yang masih mengandalkan bantuan luar negeri untuk mendanai pembangunan, baik melalui pinjaman atau utang maupun hibah (grant) luar negeri. Langkah ini diambil karena nilai investasi (investastion) untuk pembangunan lebih tinggi dari tabungan (saving). Dari perspektif ekonomi, menurut Suparmoko pembiayaan pembangunan yang bertumpu pada pinjaman atau utang luar negeri memiliki nilai positif karena tidak membebani masyarakat dengan pajak yang berat. Akan tetapi, jika tidak dilakukan dengan hati-hati, bisa menjadi bumerang bagi negara itu. Hal inilah yang terjadi pada Indonesia, utang luar negeri yang tidak terkontrol

³⁸ Bank Indonesia. *ULN Indonesia USD314,3 miliar Pertumbuhan Utang Jk Panjang Melambat, Utang Jk Pendek Turun*. (Jakarta: Bank Indonesia, 2016), h. 1.

menyebabkan kita terperangkap dari jebakan utang sehingga kesulitan untuk melakukan percepatan pembangunan.³⁹

Sebenarnya persoalan utang luar negeri Indonesia sesungguhnya sudah bermula sejak pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda, yaitu pada Konferensi Meja Bundar (KMB) yang diselenggarakan di Den Haag Negeri Belanda. Salah satu klausul perjanjian KMB adalah Indonesia harus membayar semua utang-utang warisan Belanda.⁴⁰ Apalagi beban hutang saat ini yang cukup menjerat. Contoh kongkrit, ketika gempa dan tsunami yang melanda Lombok dan Palu, serta merta, pemerintah kemudian mengajukan pinjaman luar negeri untuk membantu penanganan tragedi gempa dan tsunami. Oleh Menteri Keuangan, mengakui bahwa pemerintah meminjam dana asing Rp1 triliun lebih untuk membantu. Situasi ini jelas sangat tidak menguntungkan bagi Indonesia karena akan berimplikasi secara ekonomi dan politik.

Studi tentang utang luar negeri dan kaitannya dengan pengaruh ekonomi dan politik, sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh para ahli. Studi yang paling klasik misalnya dilakukan oleh Teresa Hayter dan Cheryl Payer yang mencoba mengkaitkan bantuan dan utang luar negeri dengan aspek politik. Kedua ahli ini sebenarnya sepakat bahwa utang luar negeri kurang lebih sama dengan imperialisme (*imperialism*) terhadap negara-negara berkembang, karena mereka sengaja dijebak (*trap*) untuk masuk dalam jeratan utang luar negeri yang sebagian besar terdiri dari barang-barang dan jasa asing.⁴¹ Penelitian Alesina, dkk, memperkuat studi Hayter dan Payer.⁴²

³⁹ Suparmoko, M. *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*. Edisi 4, Cetakan Keenam. (Yogyakarta: BPFE, 1996), h. 240.

⁴⁰ Hasil KMB harus dibayar mahal karena Indonesia dipaksa mengakui utang luar negeri Hindia Belanda. Akibatnya, terhitung sejak 1950, pemerintah memiliki dua jenis utang luar negeri yaitu utang warisan Hindia Belanda US\$43 miliar dan utang baru Rp3,8 miliar. Walaupun kemudian, utang luar negeri warisan Belanda itu secara sepihak dibatalkan oleh Soekarno pada tahun 1966 akibat politik konfrontasi pembebasan Irian Barat, namun setelah Soekarno lengser, utang itu segera dilanjutkan pelunasannya oleh Soeharto. Lihat, Baswir, Revrison. *Bahaya Neoliberalisme*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 69

⁴¹ Arief, Sritua. *Indonesia Tanah Air Beta*. (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2001), h. 166.

⁴² Alesina, Alberto dan David Dollar. "Who Gives Foreign Aid to Whom and Why". *Journal of Economic Growth* 5 (March 2000), h. 33-63.

Kondisi inilah yang dialami Indonesia saat ini, dimana kita sangat tergantung pada utang luar negeri untuk membiayai program dan proyek pembangunan. Ketergantungan ini berimplikasi pada beban fiskal yang semakin berat (*fiscal burden*), terutama pascakrisis ekonomi 1998 karena di tengah situasi sulit kita harus melunasi bunga utang dan cicilan pokok sampai jatuh tempo pembayaran. Dari sisi ekonomi, utang luar negeri jelas berpengaruh terhadap perekonomian suatu negara. Kajian Davis, atas perekonomian di Amerika Latin membuktikan bahwa utang luar negeri, terutama yang bersumber dari pinjaman bank dalam negeri berperan besar menyebabkan turunnya aktivitas ekonomi (*economic activity*) ke level terendah.⁴³

Menurut Modeste, utang luar negeri berpengaruh terhadap meningkatnya tekanan pasar modal (*exchange market pressure*) yang ditandai oleh perubahan kredit domestik, meningkatnya harga minyak mentah, mengetatnya kebijakan moneter Amerika dan meningkatnya ketidakpastian pertumbuhan ekonomi lokal.⁴⁴ Temuan-temuan tersebut menjustifikasi studi yang dilakukan oleh Sachs dan Collins mengenai utang luar negeri negara-negara berkembang dan pengaruhnya terhadap kinerja ekonomi (*economic performance*).⁴⁵ Bagi negara-negara berkembang, utang memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja ekonomi. Artinya, kinerja ekonomi akan melemah karena digerogeti oleh pembayaran cicilan pokok utang plus bunganya.

Dari berbagai studi di atas, dan relevansi ULN dan pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, menurut penulis, pemerintah tidak memiliki komitmen yang kuat untuk melunasi utang luar negeri. Jangankan melunasi, pemerintah justru rajin menambah utang baru tanpa memperhatikan keseimbangan (*balance*) neraca pembayarannya. Proses pembangunan yang dilakukan adalah proses “*gali lubang tutup lubang*”. Artinya, melunasi ULN pada satu negara dengan jalan meminjam

⁴³ Davis, Ricardo Ffrench. “*Latin American Debt: Debtor-Creditor Relations*”. Jurnal, *Third World Quarterly* 9(4), 1987), h. 1167-1183.

⁴⁴ Modeste, Nelson. “*The Impact of the Foreign Debt Burden on Exchange Market Pressure in Guyana, 1968- 2000: An Application of the Error Correction Methodology*”. *Journal of Developing Areas* 38 (2) 2005), h. 25-39

⁴⁵ Sachs, Jeffrey D. dan Susan M. Collins (editors). *Developing Country Debt and Economic Performance: Country Studies Indonesia, Korea, Philippines, Turkey*, (Volume 3). (Chicago: University of Chicago Press. 1989)

apda negara lain. Contoh kongkrit misalnya, pasca pertemuan anual meeting IMF, World Bank di Bali, pemerintah lewat Menteri keuangan, Sri Mulyani menyatakan, bahwa ULN Indonesia di IMF sudah dilunasi. Tidak ada lagi ULN pada lembaga IMF. Tapi keesokan harinya, pemerintah mengumumkan peminjaman ULN pada Bank Dunia, sebesar Rp. 1 triliun lebih untuk mengatasi bencana gempa dan tsunami yang terjadi.⁴⁶ Pepatah gali lobang tutup lobang, pinjam uang bayar utang adalah kiasan yang pas untuk menggambarkan realitas utang luar negeri Indonesia. Ironisnya lagi, utang baru ternyata tidak mampu menutupi cicilan pokok beserta bunga utang lama. Dalam teori ekonomi, kondisi ini disebut dengan *Fisher's Paradox*, yaitu semakin banyak cicilan pokok dan bunga utang yang dibayar, semakin bertambah tinggi pula utang yang menumpuk.⁴⁷

Dari berbagai ulasan sebelumnya, menurut penulis ada tiga faktor penting yang membuat pemerintah menambah beban ULN. *Pertama*, faktor domestik. Ketidakmampuan tim ekonom pemerintah untuk menstabilkan nilai rupiah terhadap dollar dan ketidakmampuan untuk memprediksi kondisi ekonomi global, sehingga tidak memiliki instrumen menghadapi gejolak ekonomi global. *Kedua*, faktor eksternal, yaitu pengaruh nilai tukar dollar yang terus memperlihatkan perubahan.

D. Kesimpulan

Suatu Negara berutang terhadap Negara lain bukanlah suatu hal yang negatif. Namun berutang itu menjadi suatu masalah besar apabila utang tersebut tidak membuahkan hasil positif yang lebih besar dari pada nilai utang itu sendiri, yang akhirnya Negara berutang termasuk Indonesia masih belum mampu melunasi cicilan utang beserta bunganya. Kondisi ini merugikan Indonesia, bukan saja pemerintah sebagai peminjam namun masyarakat sebagai pihak yang turut menanggung beban pembayaran utang dan bunganya dengan pembayaran pajak.

Dari fakta-fakta dan data yang telah diuraikan juga, terbukti bahwa secara teoritis utang luar negeri memang berimplikasi negatif terhadap perekonomian

⁴⁶ Detikcom. Terbitan 12 Oktober 2018. Lihat juga, kompas.com. dan sejumlah tayangan televisi.

⁴⁷ Arief, Sritua. *Indonesia Tanah Air Beta...*h. 103

dan pembangunan Indonesia. Utang luar negeri menjadi kendala fiskal (*fiscal burden*) bagi pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membiayai pembangunan masyarakat melalui instrumen pengeluaran publik untuk menjalankan fungsi negara terutama di sektor pendidikan, kesehatan, subsidi dan pertahanan negara.

Sementara di sisi lain, Islam tidak melarang utang, karena dalam Islam juga mengenal hidup saling tolong menolong antar umat. Namun tolong menolong tersebut tidak diaplikasikan dalam bentuk yang dilarang Islam. Seperti pemberian bunga/riba, apapun motif, besaran maupun keperluannya. Transaksi riba melalui utang sangat sulit dilepaskan, karena itu sebaiknya tidak memiliki utang luar negeri.

Daftar Referensi

- A. Azhar Basyir, *Riba Utang Piutang dan Gadai*, (Yogyakarta: PT Al-Ma'arif, 1983), 12.
- Abd Majid As, "*Utang Luar Negeri Dalam Perspektif Al-Qur'an*", (Jurnal Asy-Syir'ah No. 7 Th. 2000), h. 23-26
- Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1992), h. 237-238
- Alesina, Alberto dan David Dollar. "*Who Gives Foreign Aid to Whom and Why*". *Journal of Economic Growth* 5 (March 2000), 33-63.
- Arief, Sritua. *Indonesia Tanah Air Beta*. (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2001), 166.
- Bank Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20181016095432-17-37549/rincian-utang-luar-negeri-indonesia-yang-tembus-rp-5410-t>. Diakses pada 17 Oktober 2018.
- Bank Indonesia. *Statistik Utang Luar Negeri Indonesia*. Vol. VII Mei, (Jakarta: Bank Indonesia, 2016), h. iii
- Bank Indonesia. *ULN Indonesia USD314,3 miliar Pertumbuhan Utang Jk Panjang Melambat, Utang Jk Pendek Turun*. (Jakarta: Bank Indonesia, 2016), 1.

Baswir, Revrisond. *Bahaya Neoliberalisme*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 69

Chowdurry, Khorshed dan Amnon Levy. (1997), *Utang Eksternal dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi*, Jurnal Ekonomi Pembangunan (Yogyakarta: FE UII, Vol. 2 Nomor 2), 337

Davis, Ricardo Ffrench. "*Latin American Debt: Debtor-Creditor Relations*". Jurnal, *Third World Quarterly* 9(4), 1987), 1167-1183.

Detikcom. Terbitan 12 Oktober 2018. Lihat juga, kompas.com. dan sejumlah tayangan televisi.

Detikfinance. Terbitan Rabu, 17 Oktober 2018.

Edy Suandi Hamid, *Perekonomian Indonesia Masalah dan Kebijakan Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 67.

<https://www.cnbcindonesia.com/market/20181017105124-17-37718/fantastis-utang-pemerintah-capai-rp-4416-t-naik-rp-550-t>. Diakses pada 17 Oktober 2018.

Imamudin Yuliadi., *Analisis Hutang Luar Negeri Indonesia Pendekatan Keseimbangan Makroekonomi*. Jurnal Ekuitas. Ekuitas Vol.11 No.4 Desember 2007: h. 535–551. Akreditasi No.55a/DIKTI/Kep/2006. DOI: 10.24034/j25485024.y2007.v11.i4.2276

Kaminsky, Graciela L dan Alfredo Preiera, *The Debt Crisis: Lessons of the 1980s for 1990s*, (Journal of Development Economics, Vol. 50, 1996), 221.

Lihat Q.S. al-Baqarah (2) : 275.

Lihat Qs. Al-Baqarah Ayat: 275.

Lihat Qs. An-Nisaa Ayat 141

Lihat, Al baqarah ayat 286.

Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, (Jakarta: Gunadarma Press, 1993), h. 98

Michael P. Todaro, *Ekonomi Pembangunan*, Jilid ke-2, Edisi ke-6 (Jakarta: Erlangga, 1997), h. 163

Modeste, Nelson. "*The Impact of the Foreign Debt Burden on Exchange Market Pressure in Guyana, 1968- 2000: An Application of the Error*

Correction Methodology". *Journal of Developing Areas* 38 (2) 2005), 25-39

Muhammad Iqbal Maulidi. *Pengaruh Utang Luar Negeri dan Penanaman Modal Asing terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia periode 1999-2011* (Jakarta: UIN syarif Hidayatullah, 2013), h. 20

Muhammad Sharif Chaudhry, *SISTEM EKONOMI ISLAM* (Jakarta: Prenada Media Group 2012), 52-53.

Roem Topatimasang, *Hutang itu Hutang*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 8.

Sachs, Jeffrey D. dan Susan M. Collins (editors). *Developing Country Debt and Economic Performance: Country Studies Indonesia, Korea, Philippines, Turkey*, (Volume 3). (Chicago: University of Chicago Press. 1989)

Suparmoko, *Keuangan Negara: Dalam Teori Dan Praktek*, Edisi ke-5, Cet. Ke-3 (Yogyakarta: BPFE, 2000), h. 243

Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Ekonomi*, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), h. 230

Todaro, Michel P. *Economic Development, 5th Edition*, (New york, Longman Publishing, 1994),.110

Tulus T.H. Tambunan, *Perekonomian Indonesia, Kajian Teoritis dan Analisis Empiris*, (cetakan kedua, Bogor : Ghalia Indonesia, 2012), 255.

Tulus Tambunan, *Perdagangan Internasional dan Neraca Pembayaran : Teori dan Empiris*, (Jakarta : LP3ES, 2001), h. 249.

Zulkarnain djamin, *Masalah Utang Luar Negeri Bagi Negara-Negara Berkembang Dan Bagaimana Indonesia Mengatasinya*, (Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1996), h. 19